

# Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung Dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb

Syarifah Isnaini

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Yogyakarta

itsnainisyarifah@gmail.com

**Abstrak: Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb.** Sejarah imperium erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan tertentu oleh masing-masing penguasa. Kebijakan dalam beragam bidang seperti halnya politik keagamaan banyak dilakukan oleh sultan atau raja sebagaimana yang terjadi pada Imperium Mughal di India. Adalah Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb, dua pemimpin Imperium Mughal yang cukup disorot oleh sejarawan sehubungan dengan pengambilan kebijakan politik keagamaan mereka. Atensi ilmiah terhadap Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb bertumpu pada pengambilan kebijakan yang dinilai sangat bertolak belakang terutama kaitannya dengan pluralisme keberagaman masyarakat India. Sultan Akbar Agung populer dengan beberapa kebijakan seperti pemberlakuan doktrin Din-e-Ilahi sehingga sering dicitrakan menjunjung tinggi toleransi beragama warga India. Sebaliknya, Aurangzeb direpresentasikan sebagai pemimpin dengan kebijakan yang cenderung merugikan pihak non-Muslim. Berkaitan dengan stigma tersebut, tulisan ini bertujuan mengungkap dan menganalisis kebijakan beserta latar belakang politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb. Tujuan ini lahir dari keyakinan bahwa setiap perilaku individu didasarkan pada motivasi tertentu sebagaimana diungkap oleh Icek Ajzen dengan the theory of planned behavior-nya. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb membawa Imperium Mughal pada pemerintahan dengan pengaruh dan corak tersendiri. Selanjutnya tiap kebijakan tidak dapat dinilai sebagai hal yang berdiri tunggal akan tetapi dilatarbelakangi kepentingan tertentu terutama dalam aspek politik. Selain itu, permasalahan justifikasi kekuasaan Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb turut berperan dalam pengambilan kebijakan politik keagamaan di lingkungan internal maupun eksternal Kerajaan Mughal.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Politik, Keagamaan, Sultan Akbar Agung, Muhiuddin Aurangzeb

**Abstract: Religious Political Policy of Sultan Akbar Agung and Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb.** The history of the empire is closely related to policymaking by each empire's ruler. Policies in various fields such as religious politics are mostly carried out by sultans or kings as it was the case in Indian Mughal Empire. It is Sultan Akbar Agung and Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb, two leaders of the Mughal Empire, who have been highlighted by historians for their religious-political policymaking. Scientific attention to Sultan Akbar Agung and Aurangzeb relies on policymaking considered to be very contradictory, especially about the Indian society pluralism. Sultan Akbar Agung is well-known for formulating several policies that supported religious tolerance, such as the enactment of the doctrine of Din-e-Ilahi. Conversely, Aurangzeb has been seen to produce destructive policies against non-Muslims. Therefore, this paper aims to analyze the policies and the religious-political background of both leaders. This goal arises from the belief that each individual's behavior is based on certain motivations as Icek Ajzen put in his theory of planned behavior. The researcher used a literature study method which results in that each of the religious-political policies by Sultan Akbar Agung and Aurangzeb gave significant influence and style to the Mughal Empire. Furthermore, each policy cannot be assessed as monolithic but based on certain interests, especially political ones. Besides, some issues related to power justification for Sultan Akbar Agung and Aurangzeb also influenced the process of making religious-political policies, in both internal and external of the Mughal Kingdom.

**Keywords:** Religious, Political, Policy, Sultan Akbar Agung, Muhiuddin Aurangzeb

## Pendahuluan

Pembacaan sejarah Islam di India tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Imperium Mughal (1526-1857 M). Imperium ini pertama kali didirikan oleh Zahiruddin Muhammad atau biasa dijuluki *Babur*, pemimpin dengan garis keturunan dari Timur Lang dan Chengis Khan.<sup>1</sup> Imperium Mughal banyak mengadopsi kebijakan termasuk di dalam ranah politik keagamaan. Terdapat dua tokoh sentral dengan perbedaan mencolok yang menjadi sorotan sejarah ketika dihadapkan dengan diskursus kebijakan politik keagamaan. Tokoh pertama merupakan raja ketiga kerajaan Mughal dalam hal ini Muhammad yang bergelarkan Sultan Akbar Agung atau *Emperor Akbar* dan *Sultan Akbar the Great*. Adapun tokoh kedua yakni Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb. Antara Sultan Akbar Agung dengan Aurangzeb masih berada dalam satu garis keturunan yang mana dalam hal ini Aurangzeb tidak lain berstatus sebagai cucu dari Sultan Akbar Agung.

Walaupun berada dalam satu kerajaan dengan rentang dan masa kekuasaan berbeda, banyak sejarawan yang menuliskan sejarah Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb disertai perbedaan karakter keduanya. Percival Spear misalnya mengungkapkan bahwa Sultan Akbar Agung dikenal sebagai sosok baik di kalangan perkampungan India Utara di samping mereka mentahbiskan karakter buruk pada Aurangzeb.<sup>2</sup> Kebijakan dalam bidang politik keagamaan sangat berperan dalam melahirkan jurang perbedaan antara keduanya sehingga tidak heran jika terdapat pandangan kontras mengenai Sultan Akbar Agung dengan Aurangzeb. Titik perbedaan bertolak dari sikap paradoksal keduanya dalam memperlakukan agama lokal masyarakat India yang mayoritas memeluk Hindu. Sultan Akbar Agung dengan beberapa doktrin keagamaannya seperti *Din-e-Ilahi* menjadikannya sebagai sosok yang menghargai *multi-religious* dan penuh toleransi.<sup>3</sup> Sikap ini cukup berkebalikan dengan Aurangzeb yang membuat jarak sedemikian rupa dengan agama lain seperti Hindu dan bah-

kan tidak jarang membatasi gerakan mereka untuk beribadah di bawah kekuasaannya.<sup>4</sup> Wacana Sultan Akbar Agung sebagai pahlawan keberagaman agama di samping Aurangzeb selaku pemimpin Islam konservatif tentu memerlukan pembacaan lebih. Tujuan penulisan makalah ini untuk memahami bagaimana kebijakan politik keagamaan dijalankan oleh Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb tanpa mengesampingkan kenyataan bahwa keduanya merupakan pemimpin yang luar biasa dan cukup berpengaruh di kerajaan Mughal. Selain itu, kajian penelitian ini meliputi pula akar dari pengambilan kebijakan tersebut disertai pengaruh yang menyertainya.

## Metode

Proses penggalan data-data sejarah memerlukan prinsip yang tepat demi tercapainya hasil studi yang teruji secara ilmiah. Pembacaan kritis mengenai wacana kebijakan politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb ini menggunakan metode studi literatur atau kepustakaan. Lebih lanjut studi kepustakaan berkuat pada pembacaan mendalam terhadap beragam daftar bacaan berkenaan dengan tema penelitian baik yang berbentuk cetak maupun elektronik. Penelusuran terhadap evidensi media cetak banyak bertumpu pada koleksi ruang perpustakaan di samping penjajakan material elektronik banyak bergantung pada jaringan media online.

Pada tahap selanjutnya yakni verifikasi peneliti berupaya mengkaji data-data kepustakaan yang diperoleh baik dengan jalan kritik luar/ (*external criticism*) maupun kritik dalam (*internal criticism*) agar diketahui orisinalitas sumber yang dijadikan patokan dalam meneliti diskursus pengambilan kebijakan politik keagamaan oleh Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb. Langkah ini penting untuk diambil agar peneliti mengetahui bahwa tidak kekeliruan penggunaan sumber material data yang digunakan dalam meneliti fakta sejarah. Setelah menelaah beragam data berkaitan dengan tema penelitian, langkah

selanjutnya daripada metode penelitian ini berkisar pada interpretasi. Kendati interpretasi berkaitan erat dengan subyektifitas namun hal ini menjadi sebuah keniscayaan agar informasi berkenaan dengan kebijakan politik keagamaan oleh Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb dapat diperoleh.

Adapun langkah terakhir daripada metode penelitian ini yakni historiografi yang menguraikan proses penyusunan dan penulisan mengenai hasil pembacaan dan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Tahap ini berupaya untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proses terjadinya sebuah sejarah. Berhubung penelitian ini berpusat pada dua raja di sebuah imperium maka ia dapat dikategorikan pada historiografi tradisional pada jenis *religio sentris*.

Penyusunan kajian mengenai kebijakan politik keagamaan kedua tokoh di atas penulis berpegang pada konsep tindakan beralasan yang dicetuskan oleh Icek Ajzen.<sup>5</sup> Konsep ini menekankan motivasi sebuah perilaku kepada dua aspek. Pertama, seseorang mendasarkan perilaku pada keyakinan mengenai konsekuensinya. Pada jenis pertama jika dikaitkan dengan pengambilan haluan politik keagamaan, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb terlaksana sebab mereka telah mempertimbangkan dengan baik segala hal yang menjadi konsekuensi perilaku mereka. Kedua, dasar perilaku seseorang berpatokan pada norma subjektif yang dimiliki. Norma subjektif yang dimaksud di sini adalah norma yang dianut secara pribadi oleh setiap manusia. Norma ini pula yang lantas mendorong pada keputusan apakah ia hendak menerima sebuah praktik tertentu dalam kehidupannya.

### Pembahasan

#### Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung

Sultan Akbar Agung memiliki nama lengkap Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Ia terlahir dari pasangan Kaisar Hu-

mayun selaku putra Babur dengan Hamida Banu Begum di Sindh pada 14 Oktober 1542. Sultan Akbar Agung tumbuh besar dalam pengawasan pamannya di Afghanistan. Ketika berusia 14 tahun tepatnya ketika tahun 1556 M, Sultan Akbar Agung meneruskan tampuk pemerintahan yang diwariskan ayahnya. Selain menghadapi kemajemukan masyarakat India, Sultan Akbar mendapati beberapa permasalahan pada tahun pertama pemerintahannya meliputi penuntutan kemerdekaan beberapa kerajaan yang dikuasai imperium Mughal, krisis ekonomi dan pemberontakan kaum Hindu di Delhi dan Agra.<sup>6</sup> Sebagai langkah penyatuan masyarakat India yang pluralistik, Sultan Akbar Agung memilih menerapkan kebijakan politik yang disebutnya sebagai *Sulh-e-Kul* (politik toleransi). Mendasarkan pada prinsip *Sulh-e-Kul*, Sultan Akbar Agung memandang sama setiap rakyat tanpa dibatasi oleh agama dan sosial.<sup>7</sup> Misi utama prinsip *Sulh-e-Kul* terletak pada cita-cita perdamaian universal yang mewujudkan dalam kesejahteraan masyarakat India dan tidak menjadikan umat Hindu sebagai objek eksploitasi akan tetapi menjadi bagian dari populasi setara.<sup>8</sup> Adapun dampak diberlakukannya politik *Sulh-e-Kul* terlihat nyata dengan diterapkannya beberapa kebijakan keagamaan berikut:

#### a. Pendirian Ibadat Khana

*Ibadat Khana* didirikan Akbar Agung di Fatihpur Sikr pada tahun 1575 M. Istilah *Ibadat Khana* merujuk pada balairung istana Mughal yang digunakan sebagai tempat diskusi perkara keagamaan yang rutin diadakan oleh Sultan Akbar Agung setiap Kamis malam. Pada awalnya diskusi keagamaan hanya berlangsung di antara sesama ulama Sunni namun kebijakan tersebut diubah oleh Sultan Akbar dikarenakan kerap terjadi selisih paham di antara mereka. Sultan Akbar Agung lantas prihatin kepada pemikiran para ulama Sunni yang dinilai kurang mumpuni dan kaku ketika memperbincangkan wacana-wacana pengetahuan agama.<sup>9</sup> Hal ini memotivasi Sultan Akbar untuk men-

gundang pula tokoh agama dan aliran lain seperti Syiah, Kristen, Hindu dan Yahudi untuk terlibat dalam diskusi. Pada kesempatan ini diadakan debat terbuka mengenai perkara-perkara keagamaan sehingga diperoleh fleksibilitas berpikir.

Pada tataran kasus, pendirian *Ibadat Khana* juga didasarkan pada kerapnya terjadi kasus perdebatan yang melibatkan dua pejabat keagamaan kerajaan yakni Syekh Abdul Nabi dan Makdumul Mulk. Puncak dari perdebatan ini terjadi ketika Syekh Abdul Nabi memvonis hukuman mati bagi seorang brahmana yang telah disinyalir mencuri perlengkapan masjid dan mengeluarkan ujaran kebencian atas Rasulullah S.A.W. Sultan Akbar Agung memandang keputusan Syekh Abdul Nabi kurang tepat sebagaimana digambarkannya dalam pembukaan *Ibadat Khana*: "kebenaran adalah penghuni setiap tempat dan bagaimana mungkin kita menganggap kebenaran hanya terbatas pada satu keyakinan."<sup>10</sup>

**b. Penetapan *Mazhar***

Dampak daripada *Sulh-i-Kul* benar-benar memotivasi Sultan Akbar Agung untuk mengamankan kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan, tidak terkecuali dari doktrin-doktrin agama yang dapat merugikan dan mengandung kekerasan sosial. Langkah ini tidak pelak kerap berbenturan dengan otoritas ulama yang telah lama menikmati posisi dalam urusan kenegaraan. Tidak terbatas pada urusan keagamaan, benturan yang terbentuk antara Sultan Akbar Agung dengan para ulama lebih bersifat politis. Hal ini disebabkan posisi ulama sebagai *Qadi-ul-Qadha* atau pengurus masalah kehakiman dan peraturan Negara memegang peranan sentral untuk mengendalikan berbagai sektor seperti pendidikan dan peradilan.<sup>11</sup>

Asumsi para ulama bahwa Sultan sedang berusaha menghapus jurang perbedaan antara Muslim dan agama

lainnya turut memperlebar konflik di antara mereka. Penghapusan beberapa kebijakan seperti *jizyah* secara langsung berimbas kepada ekonomi di samping menghasikan kecemburuan di kalangan tokoh-tokoh Islam. beberapa kebijakan Sultan Akbar Agung sempat melahirkan pemberontakan terbuka dari kalangan ulama pada 1579 namun dapat diredam dan dibentuklah kebijakan *Mazhar* pada tahun yang sama. Kebijakan pembentukan *Mazhar* lebih cenderung kepada usaha peredaman kekuatan para ulama ortodoks.<sup>12</sup> *Mazhar* merupakan dekrit yang didalamnya terdiri dari beberapa ketentuan mengenai posisi Sultan Akbar Agung sebagai berikut: 1) Sultan Akbar Agung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan penengah atas semua permasalahan (*Imam-i-Adil*). 2) *Imam-i-Adil* merupakan sosok yang paling disayangi Tuhan, barangsiapa melawannya maka mereka sedang melawan Tuhan. 3) Pangkat *Imam-i-Adil* lebih tinggi kedudukannya daripada mujtahid.<sup>13</sup>

**c. Doktrin *Din-e-Ilahi***

Kebijakan paling populer Sultan Akbar di kalangan ahli sejarah berupa pembentukan doktrin atau Undang-Undang yang dikenal dengan *Din-e-Ilahi* pada tahun 1582. Doktrin *Din-e-Ilahi* yang bermakna agama Tuhan berusaha menggabungkan berbagai aspek dari semua agama pada waktu itu sehingga praktik selibat dalam Katolik diperbolehkan dan terkadang matahari dan api digunakan sebagai objek pemujaan.<sup>14</sup> Jawaharlal Nehru lantas menyebut Sultan Akbar sebagai tokoh perbandingan agama serta menjulukinya 'Bapak nasionalisme India.'<sup>15</sup> Landasan terbentuknya *Din-e-Ilahi* tidak lain berasal dari anggapan Sultan Akbar Agung bahwa kebenaran lahir dari setiap agama sehingga diperlukan penyatuan ajaran agama-agama tersebut.<sup>16</sup>

Beberapa sejarawan menyatakan bahwa doktrin *Din-e-Ilahi* menjadi agama



baru ciptaan Sultan Akbar Agung dengan beberapa poin yang menuai pro-kontra dari beberapa kalangan. *Pertama*, penghapusan *jizyah* beribadah bagi umat Hindu dikarenakan setiap manusia memiliki hak dasar untuk menyembah masing-masing Tuhan mereka. *Kedua*, pemberian izin oleh Sultan Akbar Agung bagi agama lain untuk mendirikan tempat ibadah di mana poin ini merupakan kebijakan kontras dengan pemimpin sebelumnya yang bahkan menghancurkan sarana peribadatan non-Muslim. *Ketiga*, setiap orang yang baru masuk Islam baik diperkenankan melepaskan agamanya sesuai dengan hak dasar setiap manusia untuk beragama. *Keempat*, penyembelihan sapi dilarang bagi segenap masyarakat untuk menghormati umat Hindu dan terdapat pula larangan untuk menyembelih hewan apapun pada hari raya umat Hindu. *Kelima*, pernikahan antar agama seperti Islam dan Hindu diperbolehkan baik Muslimah dengan pria Hindu maupun sebaliknya. Keenam, kendati beberapa kalangan menolak anggapan *Din-e-Ilahi* sebagai agama baru Sultan Akbar Agung, namun setiap orang diperbolehkan meyakini aspek-aspek kebenaran Tuhan yang telah disatukan oleh Sultan Akbar Agung dan melepaskan keyakinan lamanya.<sup>17</sup>

## 2. Kebijakan Politik Keagamaan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb

Penguasa Imperium Mughal dengan kebijakan yang bertolak belakang dengan Sultan Akbar Agung adalah Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb. Ia dilahirkan pada 3 November 1618 dan menjadi seorang raja pada tahun 1658 setelah sebelumnya diayakini telah memenangkan perang berdarah atas ketiga saudaranya untuk mencapai posisi penguasa.<sup>18</sup>

Raja yang bergelar Alamghir Padshah Ghazi ini menjadi pemimpin pertama yang mengubah hampir secara total kebijakan politik keagamaan para pemimpin kerajaan Mughal sebelumnya. Aurangzeb menilai hampir seluruh penguasa Mughal sebelum

kekuasaannya telah melakukan kesalahan besar di mana mereka tidak berusaha menegakkan supremasi Islam secara *kaffah* di India. Berbeda dengan penguasa Mughal lainnya yang cenderung berpikiran terbuka, Aurangzeb merupakan raja puritan dengan kecenderungan mendalam akan doktrin Sunni serta bercita-cita menegakkan Negara di atas dasar Islam.<sup>19</sup> Pada tahun 1668, Aurangzeb menunjuk beberapa cendekiawan Islam untuk mengkodifikasi kebijakan-kebijakannya dalam hukum Islam yang disebut dengan *Fatawa-i Alamghiri*. Kodifikasi pengaturan tindakan Aurangzeb ini kemudian juga mempengaruhi beberapa kebijakan politik keagamaan selama kurang lebih empat puluh tahun masa pemerintahannya.<sup>20</sup>

### a. Pengaturan Perayaan Keagamaan

Berkebalikan dengan Sultan Akbar Agung yang biasanya terlibat dalam beberapa perayaan non-Muslim, Aurangzeb mengambil sikap sebaliknya dengan melarang beberapa perayaan keagamaan. Tidak hanya perayaan agama non-Islam seperti Diwali dan Holi namun juga perayaan *Tazia* penganut Syiah. Beberapa kebijakan Aurangzeb lainnya terkait dengan perayaan umat Hindu adalah adanya larangan menutup toko pada hari perayaan Kamada Ekadasi. Telah menjadi sebuah kebiasaan bagi umat Hindu untuk menutup usaha mereka pada hari-hari suci seperti Kamada Ekadasi akan tetapi Aurangzeb melarang praktik tersebut agar perekonomian tetap berjalan. Lebih lanjut, berkenaan dengan perayaan Diwali oleh masyarakat Hindu, Aurangzeb melarang dihidupkannya api pada malam perayaan Diwali yang biasanya berlangsung selama kurang lebih lima hari. Dengan bertujuan meniadakan pengkultusan api, pada hari-hari perayaan Diwali, Aurangzeb akan memerintahkan pegawainya untuk berkeliling dan mencegah penduduk menerangi bazar Diwali dengan api.<sup>21</sup>

Aurangzeb secara resmi membatasi beberapa perayaan keagamaan pada tahun kedelapan dari kepemimpinannya. Per-

ayaan Hindu seperti Raksha Bandhan, Dusshera, Diwali, Shivratri dan Basant turut menerima imbas kebijakan Aurangzeb. Di samping itu, Aurangzeb membatasi perayaan keagamaan seperti Nowruz yang merupakan tahun baru Persia dengan alasan menjaga ketertiban umum. Di samping kebijakan berkenaan dengan perayaan, hal-hal yang bersinggungan dengan Hindu seperti *Jharokha Darshan* juga dihindari oleh Aurangzeb. *Jharokha Darshan* merupakan budaya Hindu di mana seorang raja akan menemui rakyatnya di balkon kerajaan untuk mendengarkan keluhan mereka tepat ketika matahari terbit di Timur. Praktik ini secara tidak langsung juga menunjukkan pengagungan terhadap matahari. Sebelum Aurangzeb menghentikan *Jharokha Darshan*, para raja seperti Sultan Akbar Agung sebelumnya sempat mempraktikkan dan mengadopsi budaya ini sebagai rutinitas.<sup>22</sup>

#### b. Pemberlakuan *Jizyah*

Kebijakan lain yang tidak kalah kontroversial pada masa Aurangzeb adalah diberlakukannya kembali *jizyah* atau pajak dari kalangan non-Muslim terutama masyarakat Hindu. Pemberlakuan *jizyah* kembali diterapkan sebagaimana dipertanyakan oleh Aurangzeb kepada Zulfiqar Bahadur Nasrat Jang, seorang jenderal terpercaya pada masa itu: "mengapa kita harus memberikan tanah yang subur secara cuma-cuma kepada orang kafir? Tidakkah kamu mengetahui pahala memerangi (orang kafir) pada perang salib di kitab Shohih Bukhari Muslim?" Dengan mengacu pada hadis ini Aurangzeb berkeyakinan bahwa memperlakukan *jizyah* termasuk ke dalam kategori memerangi orang kafir dan menerapkan kebijakan tersebut tidak lain mengandung kebenaran.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa respon non-Muslim berkenaan dengan *jizyah*. Diceritakan bahwa pada suatu waktu di hari Jumat masyarakat non-Muslim menunggu kedatangan Aurangzeb yang hendak melaksanakan salat Jumat di Masjid.

Secara tumpah ruah masyarakat dari beragam kepercayaan tersebut berkerumun sehingga jalan menuju ke masjid terblokir dengan tujuan meminta kerindangan terkait kebijakan *jizyah* atas mereka. Usaha mereka tidak menghasilkan apapun dikarenakan Aurangzeb lebih menginginkan masyarakat India yang plural dapat masuk Islam sehingga terbebas dari *jizyah* di samping terdapat faktor ekonomi. Sebagai antitesis dari masyarakat yang meminta keringanan *jizyah*, Aurangzeb memberikan hadiah keuangan dan logistik bagi masyarakat yang memasuki Islam dan membuat peraturan jelas mengenai proses administrasi pencopotan agama sebelum menjadi Muslim.<sup>24</sup>

#### c. Sikap terhadap Tempat Ibadah

Kebijakan Aurangzeb juga menyasar tempat ibadah non-Muslim di mana Aurangzeb kerap menghancurkan kuil dan tempat peribadatan. Kebijakan mengenai tempat peribadatan ini sebagaimana terjadi pada sebuah kuil di Vadnagar dan Kuil Somnath di Saurath Sarkar yang dirobuhkan kembali dan penyembahan terhadap berhala dihentikan. Sebagai respon umat Hindu, di samping terjadi beberapa pemberontakan tidak jarang mereka membayar pungutan demi menjaga rumah ibadah mereka tetap aman. Menurut pengakuan Aurangzeb terhadap seorang Imam Benares, agama Islam tidak memperkenankan pendirian kuil baru dengan tetap mempertahankan bangunan yang lama.<sup>25</sup>

Kasus lainnya sehubungan dengan sikap Aurangzeb terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain adalah penodaan yang dilakukan olehnya terhadap Kuil Hindu Chintaman yang baru dibangun di Ahmedabad pada tahun 1644. Penodaan termaksud diimplementasikan dalam bentuk pembunuhan terhadap sapi yang terdapat di dalam Kuil Hindu Chintaman dan mengubah kuil tersebut menjadi masjid. Kasus ini berakhir dengan penghem-balian tanah yang masih menjadi hak

milik orang Hindu tersebut atas perintah ayahnya yakni Shah Jahan yang tidak lain merupakan cucu langsung dari Sultan Akbar Agung.<sup>26</sup> Kebijakan keagamaan mengenai tempat ibadah Aurangzeb juga tergambar jelas melalui pandangannya akan masjid. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, masjid menjadi tempat suci dan menjadi sebuah kewajiban pemimpin imperium untuk membangunnya dengan penuh perhatian. Dengan kata lain, masjid dapat memiliki hubungan pribadi dengan Aurangzeb serta dapat menjadi penopang otoritas seorang raja atau kaisar di masa itu. Pandangan Aurangzeb yang melahirkan kebijakan pembangunan masjid untuk menguatkan kepemimpinan seorang raja tidak banyak selaras dengan aktor pendukung penguasa termasuk ulama. Kontradiksi ini tercermin dalam konflik yang terjadi antara Aurangzeb dengan tokoh sufi yang bernama Syaikh Muhammadi. Tokoh sufi yang masih menjadi bagian dari kerajaan Mughal ini mengkritisi kebijakan Aurangzeb sehubungan dengan konsep masjid dan memicu pengusiran sang sufi oleh Aurangzeb. Ketika akhirnya Syaikh Muhammadi mengungsi ke salah satu masjid, Aurangzeb menuntutnya dengan klaim masjid merupakan bagian dari kekuasaan raja. sikap Aurangzeb melahirkan kemarahan syaikh dan mengomentari sikap Aurangzeb sebagai sebuah kesombongan dikarenakan tidak ada satupun penguasa mutlak sebuah masjid melainkan Allah. Akhir dari konflik ini lantas menyeret Syaikh Muhammadi ke penjara di benteng Aurangabad.<sup>27</sup>

### **3. Latar Belakang dan Pengaruh Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb**

Kebijakan politik keagamaan Sultan Akbar Agung tidak terjadi begitu saja namun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Genealogi keturunan

Sultan dapat ditemukan pada orang-orang Timurid yang memiliki hasrat perang di samping pengagum sastra tanpa ortodoksi agama tertentu. Raja Babur dan Humayun sebagai kakek dan ayahnya kendati merupakan penganut Islam akan tetapi tidak beraliran konservatif. Kondisi ini semakin didukung oleh keberadaan ibu Sultan Akbar yang berstatus sebagai putri pemuka Syiah Persia.<sup>28</sup> Sultan Akbar Agung besar tanpa asuhan kedua orangtua disebabkan pengasingan yang terjadi pada keduanya. Mendasarkan pada kondisi tersebut, Sultan Akbar Agung hidup bersama pamannya dengan memperoleh pengajaran intensif dari Abdul Latif, seorang mentor kerajaan yang cenderung liberal. Abdul Latif mengajarkan beberapa konsep harmoni kemasyarakatan sepanjang masa kecil Sultan Akbar Agung hingga tiba saatnya dia memerintah Dinasti Mughal. Tokoh terakhir yang cukup berpengaruh dalam pembentukan pemikiran Sultan Akbar Agung yakni Bairam Khan, tokoh Muslim Syiah yang beraliran bebas dan seringkali berselisih paham dengan golongan Sunni.<sup>29</sup>

Faktor lain yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan Sultan Akbar Agung berhubungan erat dengan tarekat sufi Chisti dari Afghanistan di mana dimensi keberadaannya ditandai oleh Kuil Moinuddin Chisti di Ajmer, India. Sultan Akbar Agung biasa berjalan dengan kaki telanjang untuk melakukan berbagai perenungan di Moinuddin Chisti. Sejak masa awal tiba di India pada abad ke-13, doktrin utama sufi Chisti menekankan pada keterbukaan, cinta dan toleransi tinggi. Dengan memusatkan pada cinta, sufi Chisti berusaha menguraikan kedengkian serta mengedepankan kemurahan hati tanpa mengenal batasan agama dan bangsa. Pengalaman keagamaan Akbar yang mendorongnya untuk merumuskan *Sulh-e-Kul* juga tidak terlepas dari keputusannya untuk menutup diri pada pengucilan antar agama yang menurutnya hanya melahirkan keangkuhan dan kefanatikan para tokoh agama. Tidak heran jika kemudian ia memandang unsur kebenaran berasal dari

semua agama sehingga melahirkan reformasi kreatif dalam rangka penyelesaian konflik dalam bentuk Negara baru yang toleran.<sup>30</sup>

Pemikiran Ibn Arabi yang menyatakan "seluruh dunia adalah perwujudan cinta, maka tidak pantas untuk mengutamakan sebuah agama atas agama lain" juga berperan dalam kebijakan Sultan Akbar. Dari sini dapat dipahami bahwa politik pemerintahan Sultan Akbar Agung sangat terjerat oleh doktrin sufi dengan pencarian Tuhan secara individual yang mementingkan kesadaran daripada ketaatan pada otoritas keagamaan tradisional semata. Oleh karena itu kemudian Sultan Akbar Agung mencetuskan doktrin *Din-e-Ilahi* yang dinilainya sebagai penyatuan dari semua kebenaran agama. Sejarah juga mengabadikan kebiasaan Sultan Akbar Agung yang menyukai perenungan dan menghasilkan beberapa kebijakan seperti pembentukan *Ibadat Khana*. Dengan sungguh-sungguh Sultan Akbar Agung menyatakan bahwa kebiasaan masing-masing tokoh agama yang saling mengklaim kebenaran banyak melahirkan keraguan di dalam dirinya. Sultan Akbar Agung juga menggambarkan dunia sebagai tempat penuh kontradiksi menyedihkan yang hanya dinilai oleh kemuraman pemahaman tanpa penilaian intelektual. Faktor inilah yang kemudian menginisiasi Sultan Akbar Agung untuk mendobrak tradisi lama dengan menghadirkan dialog antar agama dan komunitas.<sup>31</sup>

Pengaruh atas dobrakan tradisi Sultan Akbar Agung sekaligus berasal dari kecerdasannya dalam melihat kondisi masyarakat yang dipimpinnya. Sultan Akbar Agung menyadari sepenuhnya bahwa untuk membangun kekuasaan ia tidak hanya membutuhkan dukungan Muslim namun juga unsur pembentuk Negeri berasal dari golongan agama lain seperti kelompok Rajput. Rajut merupakan kelompok militer orang Hindu yang akhirnya berbalik menjadi pendukung Sultan Akbar ketika menyadari sisi humanisme kebijakan-kebijakan Sultan Akbar Agung. Tidak perlu diherankan jika kemudian di akhir pemerintahannya pada 1605, Kekaisaran Mughal meluas dari Kabul ke Dec-

can dan dari Laut Arab ke Teluk Bengal bahkan menjadi salah satu dari tiga raksasa Asia di samping Ottoman dan Safawi. Beragam entitas mendukung kekaisaran Mughal di bawah Sultan Akbar Agung dengan adanya fakta mengenai pengungsi dan penyair Syiah yang melarikan diri dari kerajaan Persia menuju tanah kebebasan Sultan Akbar Agung.<sup>32</sup>

Adapun Aurangzeb seringkali dilekatkan pada citra fanatik agama dan golongan serta menjadi aktor penting dalam melemahkan Imperium Mughal. Tidak banyak sejarawan yang menulis latar belakang pendidikan Aurangzeb namun disebutkan bahwa Maulavi Abdul Latif Sultanpuri menjadi guru pertama baginya. Sejak kecil Aurangzeb digambarkan sebagai sosok yang menyukai teologi Islam, menyalin al-Quran dan hadis Nabi serta sangat menyukai karya-karya Imam Ghazali.<sup>33</sup>

Apabila Sultan Akbar memiliki motif politik dalam kebijakannya, maka penegakan Islam oleh Aurangzeb juga tidak terlepas dari kepentingan legitimasi politiknya yang sudah bermasalah sejak awal. Aurangzeb diketahui terlibat perang dengan ketiga saudaranya demi memperebutkan tahta kerajaan Mughal dan berujung pada kematian saudara-saudaranya di tangan Aurangzeb. Tidak cukup berhenti di sana, Aurangzeb juga memenjarakan dan menetapkan status tahanan rumah bagi pemimpin sebelumnya yang tidak lain merupakan ayahnya sendiri, Shah Jahan.<sup>34</sup> Beberapa penerapan kebijakan berhubungan erat dengan intrik politik Aurangzeb kendati juga terdapat rasionalisasi di dalam kebijakan-kebijakan keagamaannya. Hal ini seperti yang terjadi pada praktik pemberlakuan *jizyah* yang diterapkan kembali pada 1679 seiring dengan upaya peningkatan mobilisasi dukungan dari berbagai lini terutama para ulama atau teolog. Penetapan *jizyah* di bawah tampuk pemerintahan Aurangzeb disimpan di kas terpisah dengan nama *Khazanah-i-Jizyah*. Hasil dari pengumpulan *Khazanah-i-Jizyah* lantas dialokasikan bagi anggota kelas-kelas terpelajar dan golongan para ulama lebih-lebih pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perbendaharaan *jizyah* tidak lain be-



rasal dari kalangan ulama.<sup>35</sup> Pengaruh kebijakan seperti pengenaan kembali *jizyah* lantas menguntungkan Aurangzeb melalui perolehan dukungan kekuasaan di satu sisi dengan citra penghormatan para teolog di sisi lain. Kondisi perekonomian pasca peperangan antara Aurangzeb dengan saudara-saudaranya juga membutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit. Pengaruh lain daripada kebijakan keagamaan Aurangzeb dapat mengembalikan pengaturan awal aktor-aktor yang berstatus sebagai tiga pilar Negara meliputi ulama, *umara'* dan sultan di mana posisi ini pernah dihapuskan di masa Sultan Akbar Agung selaku penguasa tunggal.<sup>36</sup>

Terlepas dari kepentingan politik, latar belakang beberapa politik keagamaan Aurangzeb lainnya seperti pembatasan beberapa perayaan keagamaan juga memiliki sisi lain yang patut diperhatikan. Tentu saja pembatasan dan bahkan larangan perayaan keagamaan baik Muslim maupun non-Muslim merupakan hal yang benar adanya akan tetapi perlu dipahami bahwa Aurangzeb tidak melarang keseluruhan perayaan di India. Terdapat beberapa perayaan yang berpotensi menimbulkan konflik dan kericuhan serta menimbulkan masalah hukum. Festival Holi dan Muharam merupakan dua contoh yang dimaksud oleh Aurangzeb sebagai kegiatan yang perlu dibatasi untuk mengedepankan keselamatan umum.<sup>37</sup> Sama halnya dengan kebijakan keagamaan berkaitan dengan tempat peibadatan terutama kalangan non-Muslim seperti Hindu. Latar belakang beberapa penghancuran tempat sebagaimana telah dijabarkan pada poin kebijakan keagamaan Aurangzeb tidak lantas berdiri di atas permasalahan tunggal. Terdapat beberapa intrik politik yang justru terdapat di dalam kuil yang dihancurkan Aurangzeb. Kuil-kuil Hindu di bawah pemerintahan Aurangzeb seringkali tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan akan tetapi menjadi tempat di mana kekuasaan beberapa pemuka Hindu dibangun dan disahkan. Tindakan penghancuran kuil oleh Aurangzeb menandai penumpasan bibit-bibit pemberontakan kecil yang akan menjadi ancaman kekua-

saan Aurangzeb sendiri. Berdasarkan fakta mengenai hubungan keberadaan kuil dengan sebuah ancaman kekuasaan, dapat dipahami bahwa kebijakan semacam itu lebih dekat kepada kebutuhan politik Negara daripada senjata ideologis untuk menindas non-Muslim. Aurangzeb dinilai merebut dan memusnahkan harapan golongan non Muslim untuk merebut kekuasaan Islam dan keadaan ini menjadikan kondisi berbalik di mana mereka tidak lagi mendukung kerajaan Mughal serta berkontribusi pada kemunduran imperium pada 1857.<sup>38</sup>

### Kesimpulan

Kebijakan politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb memiliki masing-masing posisi yang mengesankan dan berpengaruh bagi Imperium Mughal. Latar belakang pengambilan kebijakan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik. Sultan Akbar Agung dengan latar belakang pendidikan dan keluarga yang cenderung memiliki kebebasan ekspresi beragama mengambil langkah penerapan kebijakan *Sulh-i-Kul* demi tercapainya kesatuan masyarakat yang begitu jamak pada masanya. Sebagai tindak lanjut, Sultan Akbar Agung juga mewujudkan dekrit *Mazhar* demi memuluskan langkahnya sebagai penguasa tunggal imperium Mughal. Langkah-langkah kebijakan Sultan Akbar Agung dinilai membawa dampak besar dengan adanya penyatuan masyarakat sekaligus membuka jalan baru bagi sebuah kekuatan saingan baru dari kalangan non-Muslim.

Tidak jauh berbeda dengan Sultan Akbar Agung, Aurangzeb turut menerapkan berbagai kebijakan keagamaan berdasarkan kepentingannya di lingkungan kerajaan Mughal. Motif politik membawa Aurangzeb pada kebijakan paradoksal dengan Sultan Akbar Agung. Kebutuhan legitimasi kekuasaan pasca peperangan dengan ketiga saudaranya yang menyebabkan kebencian beberapa pihak istana dan merosotnya perekonomian memotivasi Aurangzeb untuk menetapkan kebijakan seperti pemberlakuan *jizyah* kembali. Pada masa kekuasaan Aurangzeb, didukung oleh latar belakang Aurangzeb yang memi-

liki kecenderungan sektarian yang kuat, ia menemukan praktik-praktik dan tempat peribadatan yang berpotensi melahirkan pemberontakan sehingga dirumuskan penerapan kebijakan seperti penghancuran beberapa tempat ibadah.

### Endnotes

<sup>1</sup>Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Penerbit Bagaskara, 2017), hlm 314.

<sup>2</sup>Percival Spear, *India: A Modern History* (Ann Harbor: The University of Michigan Press, 1961).

<sup>3</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm 85.

<sup>4</sup>T.G.S Mulia, *India: Sejarah Politik Dan Perkembangan Kebangsaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1959), hlm 77.

<sup>5</sup>Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behaviour," *Organizational Behavior And Human Decision Processes Journal* 50 (1991).

<sup>6</sup>Prinsip Sulh-e-kul secara tidak langsung juga menggambarkan penyesalan Sultan Akbar Agung akan perilaku pemimpin terdahulu kerajaan Mughal yang telah memaksa penganut agama Brahmana untuk bertransformasi menjadi pemeluk Islam. Gerakan yang berlandaskan prinsip Sulh-e-kul juga meleburkan perilaku klaim kebenaran dan kekerasan monoteisme. Salah satu sikap nyata Sultan Akbar berkaitan dengan prinsip Sulh-e-kul yakni pengubahan kembali masjid menjadi kuil Hindu. Mohammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: Sagi, 2002), hlm 70.

<sup>7</sup>Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 205.

<sup>8</sup>Tadd Fernee, *Enlightenment and Violence: Modernity and Nation-Making* (New Delhi: SAGE Publications India, 2014), hlm 2-3.

<sup>9</sup>Shed Ameer Ali, *Islamic History and Culture: Islamic Culture under the Moghuls* (Delhi: Amar Prakashan, 1981), hlm 205.

<sup>10</sup>Saiyid Athar Abbas Rizvi, *Akbar and His Age* (New Delhi: Northern Book Centre, 1999), hlm 9.

<sup>11</sup>M. Anusha Angel, "Akbar's Religious Policy," *International Journal of Humanities and*

*Social Science Research* 4 (September 2018).

<sup>12</sup>P.M. Holt, Ann K. Lambton, and Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, vol. II (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), hlm 42.

<sup>13</sup>Angel, "Akbar's Religious Policy."

<sup>14</sup>Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, hlm 316.

<sup>15</sup>Kalimat asli dari pengakuan Jawaharlal Nehru terungkap dari kalimatnya: As a warrior he conquered large parts of India, but his eyes set another and more enduring conquest, the conquest of minds and hearts of the peoples". Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India* (London: Meridian Books, 1950), hlm 237.

<sup>16</sup>Abraham Eraly, *The Mughal Throne, The Saga of India's Great Emperors* (London: Phoenix Publisher, 2004), hlm 211. Lihat pula Makhanlal Roychoudhury, *The Din-i-Ilahi or the Religion of Akbar* (Calcutta: University of Calcutta, 1941), hlm 283.

<sup>17</sup>A.Y. Almuhtar, *Toleransi-Toleransi Islam: Toleransi Kaum Muslimin Dan Sikap Lawannya* (Bandung: N.V. Tarate, 1983), hlm 158-159. Lihat pula Ezad Azraai Jamsari, dkk, "Akbar (1556-1605) and India Unification Under The Mughals," *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 8 (December 2017).

<sup>18</sup>Aniket Thatagata Chetty, "Unravelling the Myth: Exploring State and Religion Under Aurangzeb," *Global Journal of Archeology and Anthropology* 6 (August 2018).

<sup>19</sup>Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), hlm 96.

<sup>20</sup>Richard Eaton, *Essays on Islam and Indian History* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).

<sup>21</sup>Shama Mahmood, "Suba Gujarat Under Aurangzeb" (University of Bardoa, 1999), hlm 128.

<sup>22</sup>Satish Chandra, "Jizyah and State in Seventeenth Century India," *Journal of the Social and Economic History of the Orient* 12 (September 1969). Lihat pula Jadunath Sarkar, *History of Aurangzeb* (Longmans: Green, 1920).

<sup>23</sup>Jamshedji Hormasji Bilimoriya, *Rukhat-i-Alamghiri or Letters of Aurungezebe with Historical and Explanation Notes* (Bombay: Cherag Printing Press, 1908), hlm 154-155.

<sup>24</sup> Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib: Based on Original Sources* (New Delhi: Orient Longman Limited, 1919), hlm 309-315.

<sup>25</sup> Ibid., hlm 174.

<sup>26</sup> Richard M. Eaton, "Temple Desecration And Indo-Muslim States," *Frontline Journal* 5 (January 2001).

<sup>27</sup> Muzaffar Alam, "Assimilation from a Distance: Confrontation and Sufi Accommodation in Awadh Society," in *Tradition, Dissent, and Ideology: Essays in Honour of Romila Thapar* (Delhi: Oxford University Press, 1996), hlm 177.

<sup>28</sup> Angel, "Akbar's Religious Policy."

<sup>29</sup> Ms. Shabnam Bharti, "Mughal Emperors Akbar and Aurangzeb: A Comparative Study," *International Journal of Basic and Applied Research* 9 (February 2019).

<sup>30</sup> Satish Chandra, *Medieval India: A Textbook for Classes XI-XII Part II* (New Delhi: Supreme Offset Press, 1978), hlm 169-172.

<sup>31</sup> A. Azfar Moin, "Millennial Sovereignty, Total Religion, and Total Politics," *History and Theory Journal* 56 (March 2017).

<sup>32</sup> Masashi Haneda, "Emigration of Iranian Elites to India During The 16-18th Centuries," *Cahiers D'asie Centrale N Journal* 3-4 (1997).

<sup>33</sup> M Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb* (New Delhi: Asia Publishing House, 1997), hlm 101.

<sup>34</sup> S.M. Jaffar, *The Mughal Empire from Babar to Aurangzeb* (Peshawar: S. Muhammad Sadiq Khan, 1936), hlm 281-282.

<sup>35</sup> Anuraag Khaund, "Akbar and Aurangzeb-The Saint and The Villain?," *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22 (March 2017).

<sup>36</sup> Chettry, "Unravelling the Myth: Exploring State and Religion Under Aurangzeb."

<sup>37</sup> Satish Chandra, *Parties And Politics At The Mughal Court 1707 - 1740* (New Delhi: People's Publishing House, 1972), hlm 222.

<sup>38</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*, hlm 318. Lihat pula Chettry, "Unravelling the Myth: Exploring State and Religion Under Aurangzeb."

## Endnote

### Book

1. Karim, *Sejarah Pemikiran*, 314, 316.
2. Percival Spear, *India*.
3. Nasution, 85.
4. Mulia, 77.

5. Arkoun, *The Unthought*, 70.

6. Fernee, *Enlightenment and Violence*, 2-3.

7. Ali, *Islamic History*, 205.

8. Rizvi, *Akbar*, 9.

9. Holt, Ann K. Lambton, and Bernar Lewis, *The Cambridge*, 42.

10. Nehru, *The Discovery*, 237.

11. Eraly, *The Mughal*, 211.

12. Roychoudhury, *The Din-i-Ilahi*, 283.

13. Almuhtar, *Toleransi-Toleransi Islam*, 158-159.

14. Hodgson, *The Venture*, 96.

15. Eaton, *Essays on Islam*.

16. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzeb*.

17. Bilimoriya, *Rukiat-i-Alamghiri*, 154-155.

18. Sarkar, *History of Aurangzib*, 309-315.

19. Chandra, *Medieval India*, 169-172.

20. Ali, *The Mughal*, 101.

21. Jaffar, *The Mughal Empire*, 281-282.

22. Chandra, *Parties*, 222.

23. JOURNAL ARTICLE

24. Ajzen, "The Theory".

25. Angel, "Akbar's Religious."

26. Jamsari, dkk, "Akbar (1556-1605)."

27. Chandra, "Jizyah and State."

28. Chettry, "Unravelling the Myth."

29. Eaton, "Temple Desecration."

30. Alam, "Assimilation from a Distance."

31. Bharti, "Mughal Emperors."

32. Moin, "Millennial Sovereignty."

33. Haneda, "Emigration of Iranian."

34. Khaund, "Akbar and Aurangzeb."

## Thesis

Mahmood, "Suba Gujarat" 128.

## Reference

### Book

Alam, Muzaffar. "Assimilation from a Distance: Confrontation and Sufi Accommodation in Awadh Society." In *Tradition, Dissent, and Ideology: Essays in Honour of Romila Thapar*. Delhi: Oxford University Press, 1996.

Ali, M Athar. *The Mughal Nobility under Aurangzeb*. New Delhi: Asia Publishing House, 1997.

Ali, Shed Ameer. *Islamic History and Culture: Islamic Culture under the Moghuls*. Delhi: Amar Prakashan, 1981.

Almuhtar, A.Y. *Toleransi-Toleransi Islam: Toleransi Kaum Muslimin Dan Sikap La-*



- wan-Lawannya. Bandung: N.V. Tarate, 1983.
- Arkoun, Mohammed. *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi, 2002.
- Bilimoriya, Jamshedji Hormasji. *Rukaat-i-Alamghiri or Letters of Aurungezebe with Historical and Explanation Notes*. Bombay: Cherag Printing Press, 1908.
- Chandra, Satish. *Medieval India: A Textbook for Classes XI-XII Part II*. New Delhi: Supreme Offset Press, 1978.
- — —. *Parties And Politics At The Mughal Court 1707 – 1740*. New Delhi: People's Publishing House, 1972.
- Eaton, Richard. *Essays on Islam and Indian History*. New Delhi: Oxford University Press, 2000.
- Eraly, Abraham. *The Mughal Throne, The Saga of India's Great Emperors*. London: Phoenix Publisher, 2004.
- Ferneer, Tadd. *Enlightenment and Violence: Modernity and Nation-Making*. New Delhi: SAGE Publications India, 2014.
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam*. III vols. Chicago: The University of Chicago Press, 1974.
- Holt, P.M., Ann K. Lambton, and Bernard Lewis. *The Cambridge History of Islam*. Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Jaffar, S.M. *The Mughal Empire from Babar to Aurangzeb*. Peshawar: S. Muhammad Sadiq Khan, 1936.
- Karim, Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Penerbit Bagaskara, 2017.
- Mulia, T.G.S. *India: Sejarah Politik Dan Pergeseran Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Nehru, Jawaharlal. *The Discovery of India*. London: Meridian Books, 1950.
- Rizvi, Saiyid Athar Abbas. *Akbar and His Age*. New Delhi: Northern Book Centre, 1999.
- Roychoudhury, Makhanlal. *The Din-i-Ilahi or the Religion of Akbar*. Calcutta: University of Calcutta, 1941.
- Sarkar, Jadunath. *History of Aurangzeb*. Longmans: Green, 1920.
- — —. *History of Aurangzeb: Based on Original Sources*. New Delhi: Orient Longman Limited, 1919.
- Spear, Percival. *India: A Modern History*. Ann Harbor: The University of Michigan Press, 1961.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Journal Article**
- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behaviour." *Organizational Behavior And Human Decision Processes Journal* 50 (1991).
- Angel, M. Anusha. "Akbar's Religious Policy." *International Journal of Humanities and Social Science Research* 4 (September 2018).
- Bharti, Ms.Shabnam. "Mughal Emperors Akbar and Aurangzeb: A Comparative Study." *International Journal of Basic and Applied Research* 9 (February 2019).
- Chandra, Satish. "Jizyah and State in Seventeenth Century India." *Journal of the Social and Economic History of the Orient* 12 (September 1969).
- Chetty, Aniket Thatagata. "Unravelling the Myth: Exploring State and Religion Under Aurangzeb." *Global Journal of Archeology and Anthropology* 6 (August 2018).
- Eaton, Richard M. "Temple Desecration And Indo-Muslim States." *Frontline Journal* 5 (January 2001).
- Haneda, Masashi. "Emigration of Iranian Elites to India During The 16-18th Centuries." *Cahiers D'asie Centrale N Journal* 3-4 (1997).
- Jamsari, dkk, Ezad Azraai. "Akbar (1556-1605) and India Unification Under The Mughals." *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* 8 (December 2017).
- Khaund, Anuraag. "Akbar and Aurangzeb-The Saint and The Villain?" *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22 (March 2017).
- Moin, A. Azfar. "Millennial Sovereignty, Total Religion, and Total Politics." *History and Theory Journal* 56 (March 2017).
- Thesis**
- Mahmood, Shama. "Suba Gujarat Under Aurangzeb." University of Bardoa, 1999.